

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMEKARAN
DI KALIMANTAN TENGAH (2008-2012)**



Disusun Oleh :

MEGA SELVIA

12100797

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2014

**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran
di Kalimantan Tengah (2008-2012)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

Disusun oleh:

Mega Selvia

12100797

DUTA WACANA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PEMEKARAN DI KALIMANTAN TENGAH (2008-2012)

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

MEGA SELVIA

(12100797)

dalam ujian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada tanggal 19 SEP 2014

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE., Msi., Akt.
(Ketua Tim) :
2. Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt.
(Dewan Penguji / Pembimbing) :
3. Dra. Xaveria Indri Prasasiyaningsih, M.Si.
(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 23 SEP 2014

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Bisnis

Wakil Dekan I Akuntansi



Dr. Singgih Santoso, MM.



Dr. Putriana Kristanti, MM., Akt.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah 2008-2012

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, September 2014



(Mega Selvia)

12100797

HALAMAN MOTTO

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu (Matius 7:7)

Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! (Mazmur 128:1)

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! (Yeremia 17:7)

Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati (Lukas 6:36)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus atas Berkat dan Anugerah-Nya yang senantiasa menuntun serta menyertai setiap kehidupanku.
- ❖ Keluargaku tercinta. Papah, Mamah, Adekku Elvas, Sintia Maudy dan Yoan Felix yang senantiasa memberiku dukungan baik secara materi, tenaga, waktu serta dukungan melalui doa.
- ❖ Ibu Christine Novita Dewi, SE.,M.Acc.,Akt., yang telah memberikan banyak ilmu, selalu sabar dalam mengajar dan membimbingku selama penyelesaian skripsi ini.
- ❖ My Elvandri yang selalu mendukungku, memberi semangat bahkan meluangkan waktu untuk turut ambil bagian dalam penulisan skripsi ini walaupun dengan jarak yang jauh.
- ❖ Sahabat-sahabatku Nano-Nano yang kusayangi (Theresia, Gresye, Ka Yoan, Mami “Jeje”, Litha, Dita, Cintya, Lucy, Frista “Sese”, Roy, Rendy, Ricky, Edwin) yang selalu siap meluangkan waktu untuk membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman – teman akuntansi angkatan 2010 yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.
- ❖ Almamaterku Universitas Kristen Duta Wacana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasihnya-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah 2008-2012**”. Skripsi ini dibuat untuk pemenuhan atas tugas yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Di Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penyusunan laporan dan pembuatan Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan oleh:

1. Ibu Christine Novita Dewi, SE.,M.Acc.,Akt selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
2. Keluarga penulis yang tercinta, Papah, Mamah, dan adik – adik (Elvas, Sintia Maudy, Yoan Felix). Terima kasih untuk segala bentuk kasih, doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan untuk penulis dalam menyusun laporan ini.
3. Sahabat terdekat penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan selalu menemani meskipun jarak jauh My Elvandri.
4. Dr. Singgih Santoso, SE, MM. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.

5. Dosen-dosen Fakultas Bisnis umumnya dan dosen-dosen Akuntansi khususnya yang banyak memberikan ilmu pada penulis.
6. Staf Administrasi Fakultas Bisnis yang telah mendukung Penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Sahabat – sahabat yang penulis sayangi (Theresia, Gresye, Ka Yoan, Mami “Jeje”, Litha, Dita, Cintya, Lucy, Frista “Sese”, Roy, Rendy, Ricky, Edwin) terimakasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
8. Teman – teman Akuntansi angkatan 2010 yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu dan Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca, dan apabila terdapat salah kata dalam penyusunan laporan dan pembuatan Skripsi ini , penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Otonomi Daerah.....	8

2.1.2 Keuangan Daerah.....	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.1.4 Pendapatan Daerah.....	12
2.1.5 Belanja Daerah.....	23
2.1.6 Analisis Rasio Keuangan pada APBD.....	24
2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TENGAH	
3.1 Profil Kalimantan Tengah.....	29
3.2 Sejarah Kalimantan Tengah.....	31
3.3 Visi dan Misi Kalimantan Tengah.....	42
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Jenis Data Penelitian.....	44
4.2 Sumber Data Penelitian.....	44
4.3 Desain Penelitian.....	45
4.4 Tahapan Analisis Data.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Analisis Data.....	50
5.2 Pembahasan.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Keterbatasan.....	81
6.3 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

©UKYDWN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria menetapkan rasio kemandirian keuangan daerah.....	48
Tabel 4.2 Kriteria menetapkan rasio derajat desentralisasi.....	48
Tabel 4.3 Kriteria menetapkan rasio ketergantungan keuangan daerah.....	49
Tabel 4.4 Kriteria menetapkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	49
Tabel 5.1 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012.....	50
Tabel 5.2 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2012.....	51
Tabel 5.3 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008-2012.....	51
Tabel 5.4 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012.....	52
Tabel 5.5 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012.....	52
Tabel 5.6 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2012.....	53
Tabel 5.7 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2012.....	53
Tabel 5.8 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2012.....	54

Tabel 5.9 Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012.....	54
Tabel 5.10 Kriteria menetapkan rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
Tabel 5.11 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012..	56
Tabel 5.12 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2012....	57
Tabel 5.13 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sukamara Tahun 2008-2012...	57
Tabel 5.14 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012..	58
Tabel 5.15 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012.....	58
Tabel 5.16 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2012.....	59
Tabel 5.17 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2012.....	59
Tabel 5.18 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2012.....	60
Tabel 5.19 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012.....	60
Tabel 5.20 Kriteria menetapkan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012.....	61
Tabel 5.21 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012.....	62

Tabel 5.22 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2012.....	63
Tabel 5.23 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008-2012.....	63
Tabel 5.24 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012.....	64
Tabel 5.25 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012.....	64
Tabel 5.26 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2012.....	65
Tabel 5.27 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2012.....	65
Tabel 5.28 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2012.....	66
Tabel 5.29 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012.....	66
Tabel 5.30 Kriteria Menetapkan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012.....	67
Tabel 5.31 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2012.....	68
Tabel 5.32 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2012.....	68

Tabel 5.33 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008-2012.....	69
Tabel 5.34 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012.....	69
Tabel 5.35 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012.....	70
Tabel 5.36 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2012.....	70
Tabel 5.37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2012.....	71
Tabel 5.38 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2012.....	71
Tabel 5.39 Hasil Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012.....	72
Tabel 5.40 Kriteria dalam menetapkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemebaran dar Tahun 2008-2012.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kabupaten di Kalimantan Tengah.....	30
Gambar 4.1 Kerangka Desain Penelitian.....	45

©UKDWN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2008-2012

©UKDWN

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah serta menganalisis kesiapan daerah dalam mengelola keuangan daerah pada Kabupaten Pematang Jaya di Kalimantan Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang selanjutnya menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pematang Jaya di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa keuangan daerah masih memiliki kemandirian yang tergolong rendah sekali. Dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang tergolong sangat kurang, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi juga rendah. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan prosentase $>50\%$ yang artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau provinsi sangat dominan sekali dalam membiayai kebutuhan pemerintah daerahnya, sedangkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Pematang Jaya di Kalimantan Tengah sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kemampuan Daerah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah serta menganalisis kesiapan daerah dalam mengelola keuangan daerah pada Kabupaten Pematang Siantar di Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yang selanjutnya menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pematang Siantar di Sumatera Utara Tahun 2008-2012 dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa keuangan daerah masih memiliki kemandirian yang tergolong rendah sekali. Dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang tergolong sangat kurang, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi juga rendah. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan prosentase $>50\%$ yang artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau provinsi sangat dominan sekali dalam membiayai kebutuhan pemerintah daerahnya, sedangkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Pematang Siantar di Sumatera Utara sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kemampuan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi 1998 telah membawa perubahan besar bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu munculnya semangat daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Dasar Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut, selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan tumbuhnya kesadaran dari daerah dalam pembangunan daerah secara lebih optimal, sehingga tidak lagi terkonsentrasi pada Pemerintah Pusat.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini memicu pemerintah daerah agar mampu mengelola dan meningkatkan sumber daya secara efisien, yang tercermin oleh pemerintah daerah selaku perencana dari kebijakan yang telah diterapkan. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi

daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bastian (2006 : 338), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah ini diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahannya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Adapun tujuan otonomi daerah adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dari tujuan otonomi ini terlihat jelas bahwa daerah diwajibkan/diharuskan melakukan sendiri semua kegiatan pelayanannya dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah tersebut menuntut daerah agar dapat mengelola serta meningkatkan pendapatannya secara optimal, sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pusat. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dimana tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 66 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut memberikan suatu pandangan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga otonomi daerah yang diterapkan ini diharapkan mencapai tujuan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, bukan berarti dalam pelaksanaannya otonomi daerah ini tidak ada kendala, karena masalah inilah akan berakibat fatal yaitu kegagalan pengelolaan daerah dengan baik, sehingga bukan menjadi daerah yang maju pembangunannya tetapi malah mengalami kemunduran.

Otonomi daerah memberikan harapan yang besar bagi daerah agar mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut berkaitan dengan bertambahnya anggaran pembangunan di daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), (Halim, 2012). Adapun ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi alat utama dalam dana pembangunan daerah (Meri, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam pembiayaan daerah, karena itu kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Selain itu, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pesatnya pembangunan daerah menyebabkan daerah membutuhkan alokasi dana yang besar, sehingga pembiayaan pada belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung membutuhkan tersedianya dana yang besar pula dalam membiayai kegiatan daerah tersebut. Belanja daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD, yang merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Semakin meningkatnya belanja daerah dalam suatu daerah, maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk terpenuhinya kebutuhan suatu daerah dan diharapkan pelayanan terhadap masyarakatpun menjadi lebih baik serta kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Penerapan otonomi daerah yang telah ditetapkan juga membawa dampak bagi Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Dampak yang terjadi adalah adanya perluasan/penambahan wilayah yang dikenal dengan istilah pemekaran daerah.

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek urusan pemerintahan, sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Secara umum, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui : peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan keterlibatan, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Disisi lain, pemekaran daerah membawa kekhawatiran sendiri karena minimnya penerimaan daerah dan membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Beberapa pihak khawatir dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran daerah ini hanya akan memindahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta inefisiensi dari pemerintah pusat ke daerah, dan memungkinkan munculnya raja-raja kecil di daerah (Anita, 2001).

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang kabupatennya terjadi pemekaran. Awalnya, Kalimantan Tengah memiliki 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002, serta luas wilayah yang dimiliki Kalimantan Tengah seluas 153.564 km², terbentuklah kabupaten pemekaran menjadi 14

Kabupaten/Kota. Terbentuknya kabupaten pemekaran tersebut dikarenakan kabupaten induk khususnya telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang. Kabupaten yang dimekarkan antara lain Kabupaten Katingan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau pemekaran dari Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya pemekaran dari Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Barito Timur pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan.

Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah serta pemekaran daerah ini penulis termotivasi untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah pada kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah, dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio keserasian (rasio belanja langsung dan tidak langsung), dan rasio efisiensi belanja, apakah Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah dapat membiayai belanja daerahnya dengan baik. Berdasarkan analisis rasio yang telah diuraikan, diharapkan untuk daerah dapat memberikan gambaran bahwa alasan daerah yang telah melakukan pemekaran merupakan daerah yang sudah memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai belanja daerahnya, sehingga daerah tersebut dinyatakan mandiri dan bukan disebabkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah mampu membiayai belanja daerahnya ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah serta menganalisis kesiapan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya pada Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah.

1.4. Kontribusi Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki manfaat baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun manfaat yang diharapkan :

- Membantu Pemerintah Pusat bahwa persetujuan/ijin daerah dalam melakukan pemekaran harus berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dengan prosedur, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan Undang-Undang.
- Membuktikan perhitungan rasio keuangan daerah bahwa daerah yang melakukan pemekaran belum bisa mandiri, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Pusat harus ditegaskan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Analisis Data

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan analisis terhadap rasio kemandirian Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Katingan TA 2008-2012

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	23.803.681.170	503.251.804.666	0,047299743	5%
2009	23.123.554.971	500.096.793.343	0,046238159	5%
2010	18.019.611.808	485.706.350.653	0,037099807	4%
2011	20.075.330.346	528.027.963.560	0,038019445	4%
2012	30.932.864.670	554.102.513.393	0,055825166	6%

**Tabel 5.2 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Seruyan TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	9.203.048.732	466.173.084.013	0,019741699	2%
2009	11.556.519.412	443.184.946.593	0,026076065	3%
2010	18.390.798.831	443.937.662.310	0,041426534	4%
2011	28.132.257.022	497.985.784.308	0,056492089	6%
2012	17.162.361.946	554.583.943.804	0,030946374	3%

**Tabel 5.3 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Sukamara TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	11.605.875.024	332.497.357.912	0,034905165	3%
2009	13.772.636.309	324.702.063.400	0,042416227	4%
2010	11.689.282.930	316.598.488.742	0,036921474	4%
2011	11.731.433.707	341.206.050.077	0,034382256	3%
2012	14.702.245.988	396.794.911.052	0,037052506	4%

**Tabel 5.4 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Lamandau TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	11.606.719.591	326.535.628.818	0,035545033	4%
2009	11.390.127.317	332.192.473.357	0,034287734	3%
2010	8.285.838.860	327.177.661.670	0,025325197	3%
2011	12.839.920.481	365.714.507.190	0,035109136	4%
2012	14.281.301.001	408.930.647.292	0,034923528	3%

**Tabel 5.5 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pulang
Pisau TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	7.616.638.727	375.092.720.649	0,020306016	2%
2009	13.085.353.211	395.342.141.878	0,033098807	3%
2010	8.234.487.031	375.700.416.732	0,021917695	2%
2011	13.253.619.960	414.938.098.647	0,031941198	3%
2012	17.475.399.237	466.790.894.431	0,037437318	4%

**Tabel 5.6 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Murung Raya TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	11.654.853.002	446.915.147.025	0,026078447	3%
2009	18.854.660.883	439.474.201.369	0,042902771	4%
2010	16.587.486.111	452.381.234.405	0,036667052	4%
2011	19.348.266.307	505.794.369.651	0,038253226	4%
2012	25.881.483.399	715.546.100.000	0,036170253	4%

**Tabel 5.7 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunung
Mas TA 2008-2012**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	9.727.050.814			
2009	11.578.632.572	372.492.898.306	0,03108417	3%
2010	13.718.150.722	380.546.956.011	0,03604851	3%
2011	15.793.358.675	426.515.120.771	0,037028837	4%
2012	22.189.739.349	481.914.292.955	0,046044991	5%

Tabel 5.8 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur TA 2008-2012

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian	%
2008	14.064.967.244	364.726.262.931	0,038563078	4%
2009	18.957.595.100	343.169.436.625	0,055242668	6%
2010	13.198.385.614	338.232.616.731	0,039021623	4%
2011	12.860.358.478	395.872.392.557	0,032486121	3%
2012	16.967.686.769	446.882.482.933	0,037969013	4%

Secara ringkas rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 5.9 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pemebaran di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2008-2012

Kabupaten Pemekaran	2008	2009	2010	2011	2012
Katingan	5%	5%	4%	4%	6%
Seruyan	2%	3%	4%	6%	3%
Sukamara	3%	4%	4%	3%	4%
Lamandau	4%	3%	3%	4%	3%
Pulang Pisau	2%	3%	2%	3%	4%
Murung Raya	3%	4%	4%	4%	4%
Gunung Mas		3%	4%	4%	5%
Barito Timur	4%	6%	4%	3%	4%

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dikategorikan sebagai berikut :

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0 – 25	Rendah Sekali
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi

Tabel 5.10 Sumber : Abdul Halim. 2004 dalam Ana. 2010

Berdasarkan prosentase rasio kemandirian keuangan daerah, semua kabupaten pemekaran di provinsi kalimantan tengah tahun 2008-2012 yang menjadi sampel penelitian ini termasuk dalam kategori rendah sekali (Tabel 5.10). Terlihat pada Tabel 5.9 bahwa prosentase rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah berkisar dari 2% - 6%. Kabupaten pemekaran yang berada diangka 2% adalah Kabupaten Seruyan tahun 2008, dan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2008 dan 2010, sedangkan Kabupaten Pemekaran yang berada diangka 6% adalah Kabupaten Katingan tahun 2012, Kabupaten Seruyan tahun 2011, dan Kabupaten Barito Timur tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dapat dikatakan belum mandiri, artinya bahwa Kabupaten Pemekaran tersebut masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga mengandalkan sumber pendapatan dari pihak eksternal yang berupa bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Menurut Widodo (Halim : 2012), menyatakan bahwa semakin tinggi prosentase rasio kemandirian keuangan daerah, menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan prosentase yang rendah sekali, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Pekarayan di Provinsi Kalimantan Tengah ini masih rendah sekali.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Katingan TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	23.803.681.170	533.472.167.590	0,044620287	4%
2009	23.123.554.971	553.017.884.034	0,041813395	4%
2010	18.019.611.808	561.760.894.790	0,032077014	3%
2011	20.075.330.346	629.323.106.386	0,031899878	3%
2012	30.932.864.670	683.946.000.000	0,045227057	5%

Tabel 5.12 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Seruyan TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	9.203.048.732	485.322.936.115	0,018962732	2%
2009	11.556.519.412	569.284.868.802	0,020300064	2%
2010	18.390.798.831	588.149.553.407	0,031268916	3%
2011	28.132.257.022	615.523.854.107	0,045704576	5%
2012	17.162.361.946	677.211.000.000	0,02534271	3%

**Tabel 5.13 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sukamara
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	11.605.875.024	350.165.313.541	0,033143988	3%
2009	13.772.636.309	377.626.985.299	0,036471536	4%
2010	11.689.282.930	365.547.095.808	0,031977502	3%
2011	11.731.433.707	387.708.727.332	0,030258369	3%
2012	14.702.245.988	436.964.000.000	0,033646355	3%

**Tabel 5.14 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Lamandau
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	11.606.719.591	372.329.492.264	0,032176287	3%
2009	11.390.127.317	378.090.410.070	0,031764837	3%
2010	8.285.838.860	388.164.601.951	0,022302548	2%
2011	12.839.920.481	461.571.331.547	0,028834951	3%
2012	14.281.301.001	485.070.000.000	0,030621204	3%

**Tabel 5.15 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pulang Pisau
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	7.616.638.727	392.949.286.637	0,019383261	2%
2009	13.085.353.211	446.560.510.025	0,029302531	3%
2010	8.234.487.031	437.560.184.619	0,018819096	2%
2011	13.253.619.960	521.177.964.573	0,025430123	3%
2012	17.475.399.237	538.017.000.000	0,032481128	3%

**Tabel 5.16 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Murung Raya
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	11.654.853.002	529.498.923.845	0,022011099	2%
2009	18.854.660.883	539.728.940.142	0,034933574	3%
2010	16.587.486.111	543.401.661.966	0,030525277	3%
2011	19.348.266.307	662.318.869.640	0,029212917	3%
2012	25.881.483.399	786.358.000.000	0,032913105	3%

**Tabel 5.17 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Gunung Mas
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	9.727.050.814	411.308.603.993	0,023649033	2%
2009	11.578.632.572	458.647.881.119	0,025245146	3%
2010	13.718.150.722	458.383.292.053	0,029927249	3%
2011	15.793.358.675	533.076.340.963	0,029626824	3%
2012	22.189.739.349	570.980.000.000	0,038862551	4%

**Tabel 5.18 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Barito Timur
TA 2008-2012**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	%
2008	14.064.967.244	385.399.740.140	0,036494491	4%
2009	18.957.595.100	383.853.989.898	0,049387516	5%
2010	13.198.385.614	388.874.322.653	0,033939977	3%
2011	12.860.358.478	519.261.534.952	0,024766663	2%
2012	16.967.686.769	559.328.000.000	0,030335844	3%

Secara ringkas rasio derajat desentralisasi dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 5.19 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten
Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2008-2012**

Kabupaten Pemekaran	2008	2009	2010	2011	2012
Katingan	4%	4%	3%	3%	5%
Seruyan	2%	2%	3%	5%	3%
Sukamara	3%	4%	3%	3%	3%
Lamandau	3%	3%	2%	3%	3%
Pulang Pisau	2%	3%	2%	3%	3%
Murung Raya	2%	3%	3%	3%	3%
Gunung Mas	2%	3%	3%	3%	4%
Barito Timur	4%	5%	3%	2%	3%

Kriteria untuk menetapkan derajat desentralisasi dikategorikan sebagai berikut :

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Tabel 5.20 Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 dalam I Dewa dan Hery 2010

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi berdasarkan Tabel 5.19 menunjukkan bahwa kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah menurut Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 dalam I Dewa dan Hery 2010 (Tabel 5.20) dikategorikan sangat kurang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.19 rasio derajat desentralisasi adalah 2% - 5%. Rasio derajat desentralisasi 2% meliputi Kabupaten Seruyan tahun 2008 dan 2009, Kabupaten Lamandau tahun 2010, Kabupaten Pulang Pisau tahun 2008 dan 2010, Kabupaten Murung Raya tahun 2008, Kabupaten Gunung Mas tahun 2008, dan Kabupaten Barito Timur 2011. Sedangkan rasio derajat desentralisasi 5% meliputi Kabupaten Katingan tahun 2012, Kabupaten Seruyan tahun 2011, dan Kabupaten Barito Timur tahun 2009. Hal tersebut diartikan bahwa derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah masih sangat kurang. Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat Mahmudi, penelitian ini menunjukkan Kabupaten Pemekaran di

Kalimantan Tengah memiliki rasio yang rendah, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pun masih rendah

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan analisis terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.21 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan
TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	509.668.486.420	533.472.167.590	0,955379713	96%
2009	515.156.409.109	553.017.884.034	0,931536617	93%
2010	534.001.177.925	561.760.894.790	0,950584462	95%
2011	595.272.472.437	629.323.106.386	0,945893241	95%
2012	649.572.000.000	683.946.000.000	0,949741646	95%

**Tabel 5.22 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan
TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	476.119.887.383	485.322.936.115	0,981037268	98%
2009	555.338.263.273	569.284.868.802	0,975501535	98%
2010	569.418.425.576	588.149.553.407	0,968152441	97%
2011	582.922.303.054	615.523.854.107	0,947034464	95%
2012	649.572.000.000	677.211.000.000	0,959187019	96%

**Tabel 5.23 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara
TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	385.332.647.910	350.165.313.541	1,100430662	110%
2009	363.848.089.046	377.626.985.299	0,963511887	96%
2010	353.086.427.103	365.547.095.808	0,965912275	97%
2011	374.936.679.248	387.708.727.332	0,96705762	97%
2012	422.262.000.000	436.964.000.000	0,966354208	97%

**Tabel 5.24 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau
TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	360.722.772.674	372.329.492.264	0,968826752	97%
2009	358.576.604.453	378.090.410.070	0,94838852	95%
2010	371.519.829.871	388.164.601.951	0,957119294	96%
2011	445.290.179.667	461.571.331.547	0,964726683	96%
2012	466.386.000.000	485.070.000.000	0,961481848	96%

**Tabel 5.25 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	385.332.647.910	392.949.286.637	0,980616739	98%
2009	433.225.156.814	446.560.510.025	0,970137634	97%
2010	429.325.697.588	437.560.184.619	0,981180904	98%
2011	507.924.344.612	521.177.964.573	0,974569877	97%
2012	520.542.000.000	538.017.000.000	0,967519614	97%

**Tabel 5.26 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Murung Raya TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	509.987.955.788	529.498.923.845	0,963152016	96%
2009	520.624.279.258	539.728.940.142	0,964603231	96%
2010	526.814.175.855	543.401.661.966	0,969474723	97%
2011	642.870.603.333	662.318.869.640	0,970636098	97%
2012	760.476.000.000	786.358.000.000	0,967086238	97%

**Tabel 5.27 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten
Gunung Mas TA 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	401.469.324.763	411.308.603.993	0,97607811	98%
2009	387.724.098.047	458.647.881.119	0,845363326	85%
2010	444.665.141.331	458.383.292.053	0,970072751	97%
2011	517.282.982.288	533.076.340.963	0,970373176	97%
2012	548.790.000.000	570.980.000.000	0,961136993	96%

Tabel 5.28 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur TA 2008-2012

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	%
2008	371.334.771.896	385.399.740.140	0,963505507	96%
2009	364.646.394.797	383.853.989.898	0,949961195	95%
2010	370.181.326.781	388.874.322.653	0,951930496	95%
2011	484.511.485.794	519.261.534.952	0,933077945	93%
2012	525.120.000.000	559.328.000.000	0,938840895	94%

Secara ringkas rasio ketergantungan keuangan daerah dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 5.29 Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pemebaran di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2008-2012

Kabupaten Pemebaran	2008	2009	2010	2011	2012
Katingan	96%	93%	95%	95%	95%
Seruyan	98%	98%	97%	95%	96%
Sukamara	110%	96%	97%	97%	97%
Lamandau	97%	95%	96%	96%	96%
Pulang Pisau	98%	97%	98%	97%	97%
Murung Raya	96%	96%	97%	97%	97%
Gunung Mas	98%	85%	97%	97%	96%
Barito Timur	96%	95%	95%	93%	94%

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Prosentase Pendapatan Transfer terhadap TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Tabel 5.30 Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 dalam I Dewa dan Hery 2010

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Tabel 5.29 dan kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah Tabel 5.30, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pekarayan di Kalimantan Tengah TA 2008-2012 dikategorikan sangat tinggi. Terlihat bahwa prosentase yang dicapai adalah 93% - 110%. Kabupaten Katingan tahun 2009 dan Kabupaten Barito Timur tahun 2011 dengan prosentase 93%, serta Kabupaten Sukamara tahun 2008 dengan prosentase 110%. Hasil prosentase yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sangat tinggi, artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi juga sangat tinggi. Hasil penelitian ini senada dengan teori yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010) mengatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan analisis terhadap rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Katingan TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	23.803.681.170	17.250.000.000	1,379923546	138%
2009	23.123.554.971	18.436.000.000	1,254260955	125%
2010	18.019.611.808	27.898.936.650	0,645888839	65%
2011	20.075.330.346	24.865.000.000	0,807373028	81%
2012	30.932.864.670	29.301.827.108	1,05566334	106%

Tabel 5.32 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Seruyan TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	9.203.048.732	13.321.000.000	0,690867708	69%
2009	11.556.519.412	13.591.000.000	0,850306777	85%
2010	18.390.798.831	14.718.536.137	1,24949918	125%
2011	28.132.257.022	18.567.880.767	1,515103278	152%
2012	17.162.361.946	19.138.462.092	0,896747182	90%

Tabel 5.33 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sukamara TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	11.605.875.024	8.675.000.000	1,337853029	134%
2009	13.772.636.309	9.555.000.000	1,441406207	144%
2010	11.689.282.930	13.106.073.623	0,891898159	89%
2011	11.731.433.707	14.438.546.004	0,81250797	81%
2012	14.702.245.988	15.701.515.838	0,936358383	94%

Tabel 5.34 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Lamandau TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	11.606.719.591	8.068.000.000	1,438611749	144%
2009	11.390.127.317	10.334.000.000	1,102199276	110%
2010	8.285.838.860	11.316.941.175	0,732162404	73%
2011	12.839.920.481	13.462.620.000	0,953746038	95%
2012	14.281.301.001	13.810.075.000	1,0341219	103%

Tabel 5.35 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Pulang Pisau TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	7.616.638.727	6.411.000.000	1,188057827	189%
2009	13.085.353.211	10.359.000.000	1,263186911	126%
2010	8.234.487.031	12.900.000.000	0,638332328	64%
2011	13.253.619.960	14.800.000.000	0,895514862	90%
2012	17.475.399.237	19.300.000.000	0,9054611	91%

Tabel 5.36 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Murung Raya TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	11.654.853.002	8.794.000.000	1,32531874	133%
2009	18.854.660.883	13.023.000.000	1,447797042	145%
2010	16.587.486.111	20.050.000.000	0,82730604	83%
2011	19.348.266.307	22.175.000.000	0,872526102	87%
2012	25.881.483.399	29.600.000.000	0,874374439	87%

Tabel 5.37 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Gunung Mas TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	9.727.050.814	10.400.000.000	0,935293348	94%
2009	11.578.632.572	11.557.000.000	1,001871816	100%
2010	13.718.150.722	20.423.482.000	0,671685206	67%
2011	15.793.358.675	20.476.532.000	0,771290699	77%
2012	22.189.739.349	21.471.600.000	1,03344601	103%

Tabel 5.38 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Barito Timur TA 2008-2012

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	%
2008	14.064.967.244	9.047.000.000	1,554655382	155%
2009	18.957.595.100	13.011.000.000	1,457043663	146%
2010	13.198.385.614	20.067.760.600	0,657691004	66%
2011	12.860.358.478	13.643.000.000	0,942634206	94%
2012	16.967.686.769	16.731.150.000	1,014137508	101%

Secara ringkas rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 5.39 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemekearan di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2008-2012

Kabupaten Pemekearan	2008	2009	2010	2011	2012
Katingan	138%	125%	65%	81%	106%
Seruyan	69%	85%	125%	152%	90%
Sukamara	134%	144%	89%	81%	94%
Lamandau	144%	110%	73%	95%	103%
Pulang Pisau	119%	126%	64%	90%	91%
Murung Raya	133%	145%	83%	87%	87%
Gunung Mas	94%	100%	67%	77%	103%
Barito Timur	155%	146%	66%	94%	101%

Kriteria untuk menetapkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Tabel 5.40 sumber : Mahmudi, 2010

Dari hasil perhitungan data dengan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tampak bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah untuk masing-masing kabupaten

cukup berbeda-beda dalam periode pengamatan 2008-2012, adapun keterangan dari tiap-tiap kabupaten antara lain :

1. Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan pada tahun 2008 dan 2009 tingkat efektivitas tergolong sangat efektif dalam merealisasikan PAD, karena Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 dan 2009 tersebut sebesar 138% dan 125%, namun pada tahun 2010 Kabupaten Katingan mengalami penurunan tingkat efektivitas menjadi tidak efektif sebesar 65%. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan efektivitas menjadi kurang efektif dimana prosentase yang diperoleh sebesar 81%. Lain halnya tahun 2012, Kabupaten Katingan kembali mengalami peningkatan efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 106% yang dikategorikan sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kabupaten Seruyan

Pada tahun 2008, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan dikategorikan tidak efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat efektivitas sebesar 69%. Tahun 2009 terjadi peningkatan efektivitas sebesar 85% dan termasuk dalam kategori kurang efektif, sedangkan tahun 2010 dan 2011 terjadi peningkatan yang besar yaitu sebesar 125% dan 152% dan dikategorikan sangat efektif. Namun pada tahun 2012, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan kembali menjadi 90% dengan kategori cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

3. Kabupaten Sukamara

Tingkat efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukamara pada tahun 2008 dan 2009 tergolong sangat efektif dengan prosentase 134% dan 144%, namun pada tahun 2010 dan 2011 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan sebesar 89% dan 81% dan tergolong kurang efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2012 tingkat efektivitas terjadi sedikit peningkatan yang tergolong cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 94%.

4. Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau berdasarkan Tabel 5.7 memiliki tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang tergolong sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 144% dan 110%. Tahun 2010 tingkat efektivitas Kabupaten Lamandau menurun menjadi 73% dan tergolong tidak efektif, kemudian pada tahun 2011 Kabupaten Lamandau mengalami sedikit peningkatan dari 73% menjadi 95% dan dikategorikan cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 mengalami peningkatan yang tergolong sangat efektif yaitu sebesar 103%.

5. Kabupaten Pulang Pisau

Tingkat efektivitas Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 119% dan 126% yang berdasarkan Tabel 5.8 termasuk dalam kategori sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah,

namun pada tahun 2010 terjadi penurunan tingkat efektivitas menjadi 64% dan termasuk dalam kategori tidak efektif. Terjadi peningkatan dalam tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 90% dan 91% dan dikategorikan cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

6. Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Tabel 5.7 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 dan 2009 di Kabupaten Murung Raya tergolong sangat efektif, karena tingkat pendapatan daerahnya sebesar 133% dan 145%. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi 83%, 87% dan 87% yang termasuk dalam kategori kurang efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

7. Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2008 Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Tabel 5.7 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 94% dan berdasarkan Tabel 5.8 nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2009 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari 94% menjadi 100% dan tergolong efektif, namun pada tahun 2010 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan yang tergolong tidak efektif, karena Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut sebesar 67%. Berdasarkan Tabel 5.7 tahun 2010 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 77% dan tergolong kurang efektif.

Peningkatan terus dilakukan oleh Kabupaten Gunung Mas dan pada tahun 2012, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencapai 103% dan berdasarkan Tabel 5.8 termasuk dalam kategori sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

8. Kabupaten Barito Timur

Tingkat efektivitas Kabupaten Barito Timur pada tahun 2008 dan 2009 dikategorikan sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 155% dan 146%, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 66% dan dikategorikan tidak efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2011 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari 66% menjadi 94% dan berdasarkan Tabel 5.8 nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan Cukup Efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2012 dan tergolong sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah yang dicapai sebesar 101%.

Pada tahun 2010, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena munculnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010 sebagai perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, sehingga terjadi peralihan penyesuaian pelaksanaan pungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2. Pembahasan

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah belum mampu mengelola keuangannya sendiri, sehingga tujuan dari motivasi setiap daerah dalam hal ini adalah pemekaran daerah perlu ditinjau kembali sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah ini bukannya meringankan Pemerintah Pusat tetapi sebaliknya memberatkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, 8 Kabupaten tersebut sudah memenuhi Kriteria Pemekaran seperti yang tercantum dalam PP No. 129 Tahun 2000. Adapun kriteria yang tercantum dalam PP No. 129 Tahun 2000 meliputi : Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah Sosial Budaya, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Daerah, serta Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Meskipun 8 Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah sudah memenuhi Kriteria Pemekaran, namun hasil penelitian yang sudah dilakukan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah dinyatakan belum mandiri dalam mengelola keuangannya. Hal ini disebabkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsilah yang dominan dalam membiayai belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 8 Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah ini sudah cukup efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya, tetapi Kabupaten Pemekaran tersebut belum mampu membiayai belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dikarenakan tujuan lain (politik maupun pribadi), maka ketergantungan dari pemerintah pusat/provinsi akan semakin meningkat dan pemerintah daerah tidak akan bisa mengurus rumah tangganya sendiri (mandiri). Hal demikian perlu untuk dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah dalam melakukan/menyetujui Pemekaran di Kabupaten, agar tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Apabila Kabupaten Pemekaran benar-benar sesuai dengan Kriteria Pemekaran, maka kemungkinan besar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Ketidakmandirinya Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah disebabkan karena belanja daerah yang semakin tinggi, sehingga tidak sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah melimpahkan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan nama Pajak Air Bawah Tanah. Melalui Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah seharusnya mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara memberi ketegasan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat

mengelola belanja daerah secara efektif, rasional yang sesuai kebutuhan masyarakat/daerah, dengan melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi akan berkurang dan tujuan otonomi daerah dapat tercapai sesuai yang diinginkan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat jelas bahwa Kabupaten Pemebaran di Kalimantan Tengah perlu diperhatikan, sehingga penulis berpendapat bahwa cita-cita otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah.

© U K D W

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pematang Jaya di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa keuangan daerah masih memiliki kemandirian yang tergolong rendah sekali. Dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang tergolong sangat kurang, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi juga rendah. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan prosentase >50% yang artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau provinsi sangat dominan sekali dalam membiayai kebutuhan pemerintah daerahnya, sedangkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Pematang Jaya di Kalimantan Tengah sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya.

Dari hasil yang telah ditunjukkan, Pemerintah Pusat harus benar-benar melihat mana Kabupaten yang pantas/layak untuk dimekarkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga dengan adanya pemekaran yang sesuai dengan kriteria tersebut dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam sektor keuangan.

6.2. Keterbatasan

Meskipun penulis sudah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian semaksimal mungkin, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini.

Keterbatasan peneliti dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Minimnya informasi mengenai Realisasi APBD Kabupaten Pemekaran dikarenakan waktu, tenaga dan kurang transparannya laporan yang dibutuhkan.
2. Penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012.
3. Dalam menganalisis keuangan daerah, digunakan 5 (lima) Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Terbatasnya waktu bagi peneliti, dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

6.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi Kabupaten Pematang Jaya di Sumatera Utara agar dapat meningkatkan kemandiriannya dengan cara mengoptimalkan sumber PAD yang berupa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Perlu adanya ketegasan bagi Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan sebagai tanda partisipasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dan menggunakan beberapa rasio saja, untuk itu penelitian ini diharapkan dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD dengan menggunakan rasio yang lebih banyak lagi sehingga akan lebih lengkap dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bisma, I Dewa Gede., & Susanto, Hery (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
- Halim, Abdul (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prihatiningsih, Ana (2010). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Sasana, Hadi (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18 No. 1. ISSN: 1412-3126.

Wulandari, Anita (2001). *Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. JKAP Volume 5, Nomor 2.

Yusuf, Meri Imelda (2013). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah di Kota Gorontalo (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo)*. Jurnal UNG.

Web :

<http://kalteng.siap.web.id/>

<http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah.html>

<http://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-solusi-dan-imajinasi/>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>

<http://www.kalteng.go.id/ogi/viewcat.asp?id=153>